



TUNTUT RAPERDA TRANSPORTASI LOKAL DITUNDA

Pengemudi Betor: Ini Urusan Perut

UMBULHARJO (MERAPI) - Ratusan pengemudi becak motor (betor) yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) menggeruduk Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (26/11). Mereka menuntut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) transportasi lokal ditunda karena tidak mengakomodir betor.

"Kami minta aturan raperda ditunda. Kalau membuat aturan harus ada solusi. Ini urusan perut," kata Ketua PBMY Suparmin saat berorasi.

Menurutnya rencana penetapan raperda transportasi lokal bisa mengancam keberadaan betor karena tidak diakomodasi. Hal itu bertentangan dengan hasil pertemuan PBMY ke Pemda DIY beberapa waktu lalu melalui Sekda DIY yang memperbolehkan betor beroperasi sampai ada aturan baru atau prototipe becak alternatif sebagai pengganti. Pihaknya mengaku bersedia betor diganti dengan becak alternatif bertena-ga listrik.

"Kami minta ditunda sampai prototipe becak alternatif disetujui sama Kemenhub. *Mbok* nunggu keputusan hasil upaya kami ke Dishub DIY. Kalau de-wan mau nanggung hidup anak istri, kami siap berhenti jika di-larang di raperda," terangnya.

Sebagian perwakilan betor ditemui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta. Anggota Pansus, Antonius Fokki Ardianto menyatakan raperda transportasi lokal mengakomodasi transportasi lokal becak (kayu) dan andong. Sedangkan betor mengacu Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lanjutnya, bukan angkutan barang dan penumpang, sehingga tidak boleh beroperasi.

"Dari hasil pembahasan terakhir, semua fraksi di dewan sepakat melarang betor. Di draf raperda, secara eksplisit tidak ada larangan betor. Tapi secara implisit ada larangan karena dalam penyusunan raperda juga mendasarkan Undang Undang Lalu Lintas," papar Fokki.

Dia menuturkan, DPRD Kota Yogyakarta berada dalam satu wilayah di DIY, sehingga meng-ikuti kebijakan Pemda DIY yang akan menggantikan betor



MERAPSI-TRI DAPMAYATI

Ratusan pengemudi betor PMBY menggelar aksi di DPRD Kota Yogyakarta menuntut raperda transportasi lokal ditunda karena tidak mengakomodir betor.

dengan becak listrik. Untuk pembahasan raperda transportasi lokal, dia mengutarakan sudah dalam tahap difasilitasi Pemda DIY. "Kalau ada masukan maupun aspirasi dari pelaku betor, kami akan bahas lagi di pansus," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo menjelaskan, hasil uji tipe dan teknis kelaikan becak alternatif kayuh di

Jlagra beberapa waktu lalu sedang dikirim ke pemerintah pusat. Uji kelaikan becak alternatif bersama Dishub DIY untuk melihat kemampuan becak alternatif dalam membawa beban penumpang dan barang maupun kekuatan saat melewati jalan tanjakan.

Jika becak alternatif kayuh berdaya 350 watt tidak mampu, dia menilai maka daya listrik akan dinaikkan dan dilakukan

uji teknis kembali. Keselamatan dan keamanan juga harus terjamin.

"Uji tipe sedang dikirim ke pusat. Kalau sah, Kemenhub akan mengeluarkan. Kota besar sudah harus memikirkan alternatif transportasi. Terkait raperda, sepanjang raperda dibahas, kami serahkan semua pada ketentuan dan mekanisme perundangan yang berlaku," tandas Wirawan. (Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005